

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia melaksanakan kehidupan demokrasi dalam kehidupan kenegaraannya. Demokrasi yaitu dalam menjalankan sistem pemerintahan, rakyat memegang peran tertinggi dalam kedaulatan dan kekuasaan (Haudi, 2021:25). Adanya demokrasi, diharapkan mampu melahirkan pemerintahan yang kokoh. Pemerintahan yang kokoh ialah pemerintahan yang rakyatnya mendukung dan turut serta secara aktif dalam menjalankan pemerintahan. Demokrasi mengandung nilai-nilai sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan kenegaraan.

Pemahaman tentang demokrasi akan membentuk perilaku individu untuk menjadi pribadi yang memiliki sikap demokratis. Dalam hal ini pendidikan mempunyai peranan yang cukup krusial dalam mengembangkan budaya demokratis. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk melahirkan warga negara yang unggul, berkualitas, serta memiliki tanggung jawab. Salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu untuk melahirkan individu yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan rasa tanggung jawab. Untuk melahirkan sikap demokratis diperlukan suatu pendidikan demokrasi yang dimulai dari sejak dini. Pendidikan demokrasi yaitu pelaksanaan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan generasi muda yang mampu memahami dan mengimplemetasikan nilai-nilai yang ada pada

demokrasi. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Zamroni (dalam Nur, 2018:96) bahwa pendidikan demokrasi dituntut untuk melahirkan individu atau seseorang yang mempunyai sikap demokratis, karena tanpa orang-orang yang mempunyai sikap demokratis dalam menjalankan kehidupannya, impian untuk melahirkan warga negara yang demokratis hanya menjadi angan-angan saja.

Sekolah adalah tempat pendidikan formal yang mempunyai peran dalam mengembangkan sikap demokratis. Sekolah merupakan suatu lembaga dalam melaksanakan pendidikan demokrasi baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Artinya sekolah memiliki upaya dalam menumbuhkembangkan sikap demokratis, menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, dapat mampu mengembangkan akal individu dalam menimbang keputusan yang bermanfaat untuk pribadinya dan orang banyak. Salah satu upaya untuk mengembangkan nilai demokrasi salah satunya yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Abbas & Djurumudi, 2020:106). Pada tingkat ini, siswa lebih mudah mengeksplorasi berbagai pemahaman, termasuk pemahaman tentang demokrasi. Hal ini merupakan sesuatu yang krusial karena agar siswa mempunyai pemahaman tentang demokrasi sekaligus agar siswa dapat mengimplementasikan apa yang telah dipahaminya termasuk dalam hal ini adalah nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan akses seorang guru untuk mengajarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada siswa, agar siswa dapat memiliki sikap demokratis (Damaresti & Harmanto, 2018).

Mata pelajaran yang memiliki akses untuk mengembangkan perilaku demokrasi siswa salah satunya adalah Pendidikan Pancasila. Melalui materi Pendidikan Pancasila, juga berupaya agar siswa dapat berpikir rasional, kreatif dan kritis. Senada dengan penelitian Shelina et al. (2019) yang menyatakan bahwa pembelajaran PPKn mempunyai peran vital untuk menanamkan sikap demokratis siswa, siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi menjadi kebiasaan sehari-harinya, percaya diri dalam mengekspresikan pendapat dan turut ikut serta dalam kegiatan sekolah. Pendidikan Pancasila merupakan suatu langkah yang harus dilewati oleh siswa untuk mengetahui tanggung jawab dan perannya agar bisa menjadi individu yang mempunyai sikap demokratis yang merupakan harapan bangsa Indonesia yakni menciptakan generasi muda yang demokratis (Hamisa & Murdiono, 2018).

Menurut Branson (dalam Syafruddin, et al., 1999:8) ada tiga kompetensi kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic disposition* yaitu salah satu diantara kompetensi kewarganegaraan yang tujuannya diharapkan agar warga negara dapat menumbuhkembangkan watak yang baik dalam dirinya. Dari 3 kompetensi terdapat 1 kompetensi yang mempunyai peran yang vital dalam mempersiapkan generasi muda yang mampu menjadi individu yang baik (*good citizen*) yakni *civic disposition*. Sejalan dengan itu Quigley et al. (dalam Mulyono, 2017:220) menyebut *civics disposition* sebagai “...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy

*functioning and common good of the democratic system*” atau “karakter berpikir warga negara yang membantu perkembangan fungsi sosial yang baik dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi”. *Civics disposition* menjelaskan tentang karakter publik dan karakter privat warga negara untuk membantu dan memelihara berkembangnya demokrasi konstitusional. *Civic disposition* adalah kecakapan kewarganegaraan, setiap warga negara harus memilikinya demi terwujudnya kehidupan negara yang sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Pada perkembangannya *civic disposition* berjalan dengan perlahan, yang didapatkan dari proses belajar seseorang yang dilakukannya baik di rumah, sekolah, organisasi, dan sebagainya. Hal inilah yang membentuk pemahaman bahwa demokrasi mengharuskan pemerintahan yang bebas dan mandiri yang memiliki tanggung jawab dari setiap warga negaranya (Branson dalam Syafruddin, et al., 1999:23).

Observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti menemukan bahwa banyak siswa SMK Negeri 50 Jakarta yang belum menjalankan *civic disposition*. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapat, kurangnya keinginan untuk berkelompok dengan orang yang tidak dekat secara komunikasi, dan kurangnya rasa semangat dalam berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, dari yang telah dipaparkan dan melihat permasalahan yang terjadi, akan dilaksanakan penelitian dengan judul “Hubungan Pemahaman Demokrasi dengan *Civic Disposition*”.

## B. Identifikasi Masalah

Uraian pada latar belakang tersebut memunculkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang demokrasi pada siswa.
2. Kurangnya pemahaman tentang watak kewarganegaraan (*civic disposition*).
3. Kurangnya penerapan dari *civic disposition* pada siswa.

## C. Pembatasan Masalah

Banyak variabel yang mempengaruhi permasalahan yang ada, akan tetapi peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya membahas dua variabel dikarenakan keterbatasan peneliti. Peneliti membatasi dengan mengajukan variabel x yaitu pemahaman demokrasi dan variabel y yaitu *civic disposition* siswa kelas XI SMK Negeri 50 Jakarta.

## D. Perumusan Masalah

Peneliti mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah terdapat hubungan pemahaman demokrasi dengan *civic disposition* siswa di kelas XI SMK Negeri 50 Jakarta?”

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretik

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan mampu menjadi sumbangsih baik dari segi teoretik, informasi dan pengetahuan untuk memahami lebih dalam tentang hubungan pemahaman demokrasi dengan *civic disposition* siswa.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Siswa

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan agar siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang demokrasi dan *civic disposition*. Melalui pemahaman tentang hubungan pemahaman demokrasi dengan *civic disposition*, diharapkan siswa dapat mengembangkan karakter kewarganegaraannya.

#### b. Guru

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan mampu memberikan manfaat dalam hal memberikan pandangan dan referensi untuk merancang kegiatan pembelajaran yang memperkuat pemahaman siswa tentang demokrasi sebagai upaya dalam membangun *civic disposition* siswa.

c. Sekolah

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan mampu menjadi masukan dan rujukan untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran di sekolah dalam memperkuat pemahaman siswa tentang demokrasi sebagai upaya membangun *civic disposition* siswa.

